

**PERILAKU PEMILIH PEREMPUAN ETNIS BATAK TOBA
PADA PEMILIHAN LANGSUNG WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MEDAN TAHUN 2010 DI LINGKUNGAN
XIV KELURAHAN SIDORAME TIMUR KECAMATAN
MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN**

Susi Elfrida Marpaung

Email : susielfrida@student.usu.ac.id

Jl. T.M. Hanafiah No. 1 Program Studi Magister Studi Pembangunan

Universitas Sumatera Utara

Diterima 30 Agustus 2013/ Disetujui 13 September 2013

Abstract

Voter participation was the subject not the object of mobilization, so he has the independence to build awareness, formulating options as well as expressing his choice. This study highlights the problem of voter behavior Female Ethnic Batak Toba in Lingkungan XIV Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Medan in the direct election of Mayor/ Deputy Mayor of first and second round of Field in 2010 by using the factors: 1) Ethnicity 2) Political Preferences Family 3) Gender 4) Identification of Party 5) Political Money 6) Image of the candidate. Studies using random sampling by involving women sample 79 ethnic Batak Toba. Results of the study it was concluded that candidate a dominant factor affecting voter behavior in the first and second rounds. It is evident from the distribution of the answers of respondents regarding the candidate's image, where the indicator lights placed first of four (4) indicators that are offered that as much as 79.

Keyword : voter behavior, Ethnicity, Gender, Candidate Image

Abstrak

Pemilih adalah subyek partisipasi bukan objek mobilisasi, sehingga Ia mempunyai kemandirian dalam membangun kesadaran, merumuskan pilihan serta mengekspresikan pilihannya. Penelitian ini menyoroti masalah perilaku pemilih Perempuan Etnis Batak Toba di Lingkungan XIV Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Medan dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah Walikota/Wakil Walikota Medan Putaran Pertama dan Kedua Tahun 2010 dengan menggunakan faktor: 1) Etnisitas 2) Preferensi Politik Keluarga 3) Gender 4) Identifikasi Partai 5) Politik Uang 6) Citra Kandidat. Penelitian menggunakan random sampling dengan melibatkan 79 sampel perempuan etnis Batak Toba. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kandidat merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pemilih pada putaran pertama dan kedua. Hal tersebut terbukti dari distribusi jawaban responden mengenai citra kandidat, dimana indikator ketokohan menempati posisi pertama dari 4 (empat) indikator yang ditawarkan yaitu sebanyak 79.

Kata kunci: Perilaku Pemilih, Etnisitas, Gender, Citra Kandidat.

PENDAHULUAN

Demokrasi dalam praktik bernegara dewasa ini, semakin mengalami puncak perkembangannya, dimana demokrasi dalam pengertian yang sederhana, sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat begitu gencar melanda setiap negara. Bahkan saat ini telah terjadi

kecenderungan global dimana demokrasi tidak sekedar menjadi wacana intelektual melainkan juga impian politik berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. Hal ini mensyaratkan diakuinya suatu negara dalam pergaulan internasional terletak pada pengakuannya akan demokrasi.

Perjalanan demokrasi di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mulai menunjukkan perubahan. Bila sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan memilih presiden dan wakil presiden oleh MPR, pasca amandemen kekuasaan tersebut beralih ke tangan rakyat. Rakyat langsung memilih presiden dan wakilnya dalam suatu pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Implikasi perubahan kekuasaan memilih presiden dan wakil presiden dari MPR ke tangan rakyat dalam perkembangan demokrasi dan ketatanegaran kita pada gilirannya diikuti pula oleh pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasca pemberlakuan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, rakyat kembali diberi tiket untuk melaksanakan peranan langsung menentukan pilihan politiknya terhadap seorang kepala daerah dan wakilnya.

Pemilih merupakan subjek partisipasi dan bukan sebagai objek mobilisasi, sehingga ia mempunyai kemandirian dalam membangun kesadaran, merumuskan pilihannya, dan mengekspresikan pilihannya sendiri. Dalam bahasa yang lain para pemilih merupakan *rational voters* yang mempunyai tanggungjawab, kesadaran, kalkulasi dan kemampuan kontrol yang kritis terhadap kandidat pilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri *traditional voters* yang fanatik, primordial, dan irasional, serta berbeda dari *swing voters* yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan politiknya (Riyanto Bedjo, 2004).

Ikut serta dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Memang, di sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia, ikut serta di dalam pemilu merupakan bagian dari apa yang disebut Bruce Ackerman dan James Fishkin sebagai *Civic Privatism*. Mengikuti Pemilu merupakan urusan pribadi,

meskipun hal ini menyangkut urusan kenegaraan/publik. (Kacung Marijan, 2010)

Dalam realitas pelaksanaannya, pemilukada memunculkan fenomena yang patut digaris bawahi. Terkadang para kandidat terbentuk oleh aspek pragmatik dan tentunya aspek legal yang ditempuh oleh para kandidat dan partai politik. Dalam proses rekrutmen calon kepala daerah sering terjadi negosiasi menyangkut kontribusi calon terhadap partai. Akibatnya, calon yang dimunculkan adalah yang berhasil memenangkan negosiasi tersebut, dengan tolak ukur utamanya berupa materi.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada langsung, tingkat partisipasi perempuan dalam ruang ini bisa dikatakan juga masih minim. Semula pilkada langsung diharapkan menjadi suatu mekanisme politik yang merepresentasikan kemampuan perempuan dalam jabatan politik di tingkatan lokal. Dengan pilkada langsung, perempuan dapat secara terbuka berkompetisi memperebutkan kursi kepala daerah. Namun kenyataannya, terlihat betapa keterwakilan perempuan dalam proses tersebut demikian rendah. Alih-alih perempuan memenangkan pilkada tersebut, jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai kandidat pun sangat sedikit. Hasil pilkada langsung justru memperlihatkan bahwa jumlah kepala daerah perempuan tidak lebih baik dibandingkan saat pemilihan tidak langsung, (Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang, Perempuan dan Pilkada Langsung, 2008).

Dalam konteks Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota, kesertaan perempuan di dalamnya merupakan suatu proses penting yang menyangkut sejauh mana perempuan itu menerima sejumlah orientasi dan nilai-nilai tentang pilkada. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa dengan terbukanya kran demokrasi yang luas memungkinkan untuk setiap elemen bangsa berperan dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan terutama dalam bidang

politik, sejatinya seluruh elemen terlibat termasuk dari kalangan perempuan. Dengan terlibatnya perempuan dalam pembangunan ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai perbaikan.

Di Indonesia terdapat berbagai macam etnis. Diketahui ada 1.128 suku bangsa di Indonesia dan sebagian besar diantaranya merupakan suku yang menganut paham patriarki. Salah satunya adalah Etnis Batak Toba. Patriarki menyeragamkan pola perilaku ataupun sudut pandang setiap etnis yang menganggap laki-laki adalah superior dan perempuan adalah inferior.

Keadaan di atas membuat suara perempuan etnis Batak Toba semakin melemah dan berkurang. Posisi perempuan yang semakin lemah dan tidak independen dari segi ekonomi dan pendidikan terutama dalam keluarga, menyebabkan perempuan termajinakan secara adat, terutama dalam pengambilan misalnya pesan dan nasehat secara umum selalu diberikan oleh kaum laki-laki dan ini berlaku bahkan bagi kaum perempuan yang berpendidikan sekalipun.

Untuk jangka waktu yang cukup lama hampir keseluruhan bidang politik didominasi kaum laki-laki. Sementara perempuan hampir tidak berperan di dalamnya, seolah-olah ada anggapan bahwa kehidupan politik bukan dunianya kaum perempuan sehubungan dengan sifatnya yang mengandung kekerasan, ketidakjujuran, tipu muslihat dan lain-lain.

Oleh sebab itu masalah kesamaan hak dari prioritas dari pengambilan keputusan menjadi pemicu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan selalu perempuan kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini berlangsung sejak zaman dahulu, sehingga dalam dunia politik kesan diskriminatif sangat terasa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perilaku pemilih perempuan etnis Batak Toba pada pemilihan langsung walikota/wakil walikota Medan putaran pertamadan kedua tahun 2010?
2. Faktor-faktor apakah yang dominan dalam penentuan perilaku pemilih perempuan etnis Batak Toba pada pemilihan langsung walikota/wakil walikota Medan putaran pertama dan kedua tahun 2010?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif sederhana dengan maksud untuk menggambarkan fenomena sosial tertentu. Populasi dalam Penelitian ini jumlah populasi adalah sebanyak 395 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 79 orang. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan angket. Data yang diperoleh melalui angket dianalisis secara kuantitatif dengan statistik sederhana dalam bentuk persentase dan tabel frekuensi dengan harapan dapat diketahui berapa persen data terjadi dibandingkan dengan data lain.

TELAAH PUSTAKA

Perilaku Pemilih

Perilaku adalah respon individu atau kelompok terhadap lingkungan. Dalam fisiologi, perilaku manusia merupakan bagian penting dari perubahan fisik yang menitik beratkan pada sifat dan karakteristik yang khas dari organ-organ atau sel-sel yang ada dalam tubuh. Dalam kacamata ilmu sosial, perilaku atau perbuatan manusia merupakan manifestasi terhadap pola-pola hubungan, dinamika, perubahan dan interaksi yang menitik beratkan pada masyarakat dan kelompok sosial sebagai satu kesatuan, serta melihat individu sebagai

bagian dari kelompok masyarakat (keluarga, kelompok sosial, kerabat, klien, suku, ras, bangsa). Diantara dua kelompok ilmu pengetahuan ini berdiri psikologi, yang membidangi individu dengan segala bentuk aktivitasnya, perbuatan, perilaku dan kerja selama hidupnya. Kerangka analisis fisiologi memberikan penjelasan mengenai macam-macam tingkah laku lahiriah, yang sifatnya jasmani. Sedangkan manusia merupakan satu totalitas jasmani-rohani.

Menurut Plano, seperti yang dikutip oleh Fadillah Putra (2004:200), perilaku politik adalah pikiran dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintah. Perilaku politik meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan, juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, lobi, dan lain sebagainya.

Ramlan Surbakti, (1997) perilaku pemilih adalah pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum (pilkada secara langsung). Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Keikutsertaan warga negara dalam pemilu merupakan tindakan atau keputusan politik seseorang yang ditentukan oleh perilaku, sikap dan persepsi politik. Perilaku pemilih di Indonesia dalam beberapa pemilihan umum sebelumnya, tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh isu ataupun kebijakan politik yang dimiliki partai yang akan dipilihnya, namun lebih mengedepankan isu agama, kelas sosial bahkan loyalitas turun temurun sebagai acuan dasar dalam menjatuhkan pilihannya. Pemilih lebih mengedepankan keyakinan dan kepentingannya dalam menjatuhkan pilihan politik walaupun pada akhirnya pemilih seringkali mendapatkan nilai

ketidakpastian yang tinggi dari janji-janji politik pilihannya.

Konfigurasi perilaku pemilih di Indonesia bersumber dari berbagai hal yang saling berkaitan. Perubahan iklim politik merupakan faktor utama dalam pemetaan dan identifikasi konfigurasi perilaku tersebut. Pada masa sebelum orde reformasi, pemilihan umum yang dilakukan, menempatkan pemilih sebagai alat legitimasi hasil yang akan diperoleh sehingga perilaku pemilih yang timbul bersifat monoton dan konstan. Berbeda dengan pemilihan umum pada masa reformasi, pemilih diberikan kebebasan penuh tapi terbatas lewat pembentukan partai maupun pendapat individu untuk melakukan komunikasi politik yang lebih intens antar pemilih dalam upaya merubah penilaian dan keyakinan terhadap sebuah pilihan politik. Pada akhirnya akan bermuara pada keputusan untuk bersikap dalam menentukan pilihannya.

Faktor lain yang membentuk konfigurasi pemilih adalah kemajemukan Indonesia dari sisi sosio-kultur, ekonomi, pendidikan dan demografi daerah. Kemajemukan berakibat lahirnya orientasi-orientasi pemilih dalam menentukan sikapnya. Pada dasarnya orientasi yang lahir tidak terlepas dari keyakinan, dalam hal ini agama dan keberlangsungan isu yang terus berkembang.

Perilaku Pemilih Perempuan

Dalam keseluruhan sejarah Indonesia, perempuan memiliki peran terbatas di parlemen. Pada pemilihan umum pertama di Indonesia (tahun 1955), persentase jumlah perempuan mencapai 6,5 persen dari anggota parlemen (Parawansa, 2010). Sejak pemilu pertama keterwakilan perempuan dalam dunia politik telah pasang-surut. Para perempuan dalam politik

memiliki peran aktif dalam masyarakat dan politik dibantu oleh kerja dan advokasi organisasi, seperti organisasi Gerwani (1945-1965) (Wieringa, 1999). Peran aktif kaum perempuan dalam politik dan masyarakat berakhir pada masa Orde Baru Soeharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965, dan selama 32 tahun pemerintahannya perempuan dibungkam dan dibatasi di ruang privat (Wieringa, 1999).

Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik menghasilkan implikasi lebih luas. Kehadiran perempuan dalam jabatan politik memiliki kepentingan simbolis. Menurut Johnson, Kabuchu dan vusiya (dalam Hughes, 2009) penilaian itu meningkatkan pandangan perempuan dan laki-laki terhadap kapasitas, aspirasi, dan harga diri perempuan. Selain ini, politisi perempuan berfokus pada isu-isu yang berbeda daripada politisi laki-laki (O'Regan, 2000; Swers, 2002 dikutip dalam Hughes, 2009) misalnya, isu-isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun hak reproduksi (Hughes, 2009).

Sejak era reformasi perempuan telah semakin terlibat dalam politik. Kaum perempuan mempunyai peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, peluang untuk menjadi pemain semakin terbuka.

Beberapa Faktor Penjelas yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih

Penelitian ini menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan rasional. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan latar belakang dan permasalahan penelitian ini. Asumsi awal yang mendasari penelitian ini di antaranya adalah (1) apabila pemilih tidak memiliki banyak waktu untuk mengevaluasi kandidat maka faktor etnisitas, gender, Politik uang sebagai sarana untuk mempengaruhi

pemilih akan berperan untuk mengarahkan preferensi pemilih; (2) apabila pemilih mempunyai penilaian yang baik mengenai kandidat, maka preferensi pemilih akan jatuh pada kandidat yang isu dan kebijakan yang ditawarkan.

Adapun uraian beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Faktor Etnisitas

Ikatan etnisitas diartikan sebagai ikatan seseorang dengan kelompok atau orang lain yang didasari oleh hal-hal yang bersifat asal, primer atau unsur bawaan. Ikatan etnisitas merupakan sesuatu ikatan yang mengandung daya paksa atau kekuatan yang didasarkan pada unsur-unsur asal atau primer yang selalu ada dalam masyarakat. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi rasa kesamaan dan hubungan kekerabatan seperti pertalian darah, penganutan agama, adat kebiasaan, cara berbahasa, serta ketaatan terhadap dimensi sosial. (Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi, 2012).

Peneliti yang pernah menyoroti masalah primordialisme di Indonesia adalah Clifford Geertz (dalam Abdussomad, 2005:6). Geertz yang cukup intens mengamati perkembangan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa melihat adanya konflik etnis pada awal kemerdekaan. Paling tidak, persaingan untuk menjadi yang terpenting dalam alam Indonesia merdeka mewarnai kehidupan banyak orang dari berbagai suku di Indonesia.

Preferensi Politik Keluarga

Elemen keluarga yang ada dalam masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari perhelatan pilkada. Suksesnya sebuah pilkada akan dimulai dari masing-masing keluarga, artinya sejauh mana anggota keluarga memandang perlu atau tidak berpartisipasi dalam alam demokrasi pilkada.

Ikatan keluarga tercipta dari adanya hubungan emosional yang kuat. Firmanzah, (2008) merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian *voting behaviour* ke dalam dua variabel yaitu predisposisi (kecenderungan) sosial ekonomi pemilih dan keluarga Pemilih.

Dalam tatanan masyarakat primordial preferensi politik keluarga apakah ayah, istri atau ikatan kekerabatan akan berpengaruh terhadap perilaku pemilih anggota keluarga, khususnya perempuan. Hal ini diakibatkan adanya ikatan emosional yang kuat atau sebagai perwujudan rasa tunduk kepada pemimpin keluarga.

Gender

Secara kuantitas, perempuan di Indonesia berjumlah 101.625.816 jiwa atau menempati 51% dari seluruh penduduk Indonesia (BPS, 2000). Tetapi, karena konstruksi budaya dalam masyarakat membuat perempuan harus menempati posisi kedua setelah laki-laki. Pembagian kerja berbasis jenis kelamin (*gender based division of labor*) telah melandasi terjadinya stratifikasi gender yang membuat perempuan hanya bekerja di sektor domestik sedangkan laki-laki di wilayah publik. Pekerjaan di sektor domestik seringkali dianggap lebih rendah daripada pekerjaan di wilayah publik, disamping juga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi (*unpaid labor*).

Selama ini keterpurukan perempuan di bidang politik praktis bermuara tidak adanya kebijakan politik yang berbasis pada kesetaraan gender. Perempuan selalu menjadi pihak yang paling rentan terhadap berbagai kesalahan pembangunan (kebijakan publik).

Identifikasi Partai

Identifikasi kepartaian adalah ikatan emosional individu dengan suatu partai. Ikatan itu merupakan identifikasi psikologis tanpa pengakuan formal atau dinyatakan

dalam bentuk keanggotaan formal dan bahkan tidak harus konsisten untuk mendukung suatu partai. Identifikasi partai telah diperoleh dari masa kanak-kanak dan dianggap relatif stabil dalam kehidupan seseorang, tetapi kadang-kadang bisa menguat atau melemah sewaktu masa dewasa, (Gaffar, 2007:191).

Menurut Campbell (dalam Afan Gaffar, 2007:191), identifikasi kepartaian adalah ikatan psikologis seseorang dengan partai politik tertentu secara terus menerus tanpa perlu pengakuan legal atau bukti-bukti formal. Bahkan, tanpa diperlukan suatu catatan bahwa orang-orang tersebut secara konsisten mendukung partai tertentu. Identifikasi seseorang dengan partai politik tertentu memerlukan waktu yang lama melalui proses sosialisasi politik berupa transformasi nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlangsung secara terus menerus. Dalam masyarakat yang mengagungkan nilai-nilai kepatuhan kepada atasan, orang tua, dan lain-lain, maka ikatan psikologis seseorang dengan partai politik tertentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sikap pimpinan masyarakat terhadap partai politik tersebut.

Politik Uang

Lebih lanjut, Flores (2000) menyebutkan bahwa di Filipina, politik uang dapat diartikan sebagai penggunaan uang atau imbalan dalam kegiatan pembelian suara untuk secara langsung mempengaruhi pilihan yang dicoblos oleh pemilih terhadap calon untuk memastikan pilihan mereka yang bersimpati melindungi kepentingan si penyumbang dana.

Sementara itu, untuk kasus Indonesia, Teten Masduki (2004) menyebutkan bahwa politik uang (*money politics*) berbeda dengan ongkos politik (*cost politic*). Politik uang

menurutnya adalah pemberian uang, atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya menurut Teten Masduki (2004) bahwa politik uang merupakan fenomena baru yang muncul dalam era reformasi. Dalam pemilu-pemilu pada era orde baru, tindak dalam pemilu lebih didominasi oleh manipulasi perhitungan suara dan pemilih, yang dilakukan oleh panitia pemilih dan birokrasi pemerintah.

Kandidat Politik

Seorang kandidat adalah identitas sebuah institusi politik yang ditawarkan ke pemilih. Para pemilih akan menilai dan menimbang kandidat mana yang kiranya akan berpihak dan mewakili suara mereka. Politikus selalu memasarkan dan dipasarkan. Mereka ingin masuk berita utama, mencium bayi, menghadiri pesta, dan menyewa biro iklan untuk membentuk citra. Dewasa ini, pemasar politik memberikan saran pada para kandidat tentang apa yang harus dikenakan, dimana harus berbicara, apa yang boleh (dan tidak boleh) diucapkan, siapa yang harus dikunjungi, dan sebagainya. Kekhawatiran yang sesungguhnya adalah bahwa pemilihan akan dimenangi oleh partai yang memiliki anggaran pemasaran yang lebih besar, dan bukan kandidat yang lebih baik, (Firmanzah:2007).

Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilih umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil

wali kota untuk kota, sebelumnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Suatu negara dikatakan demokratis apabila memenuhi prasyarat antara lain memberi kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi- preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi. Selain itu juga harus memberikan ruang untuk berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai, serta tidak melarang siapapun untuk berkompetisi untuk jabatan politik. Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat yang penting demokrasi. Oleh karena itu salah satu agenda penting dalam pilkada langsung adalah meminimalisasi potensi-potensi konflik.

Dalam hal ini, kesuksesan Pilkada langsung tidak hanya dilihat dari perspektif kemajuan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bagian inheren agenda reformasi politik, sebagai mana menjadi tuntutan mahasiswa saat meruntuhkan rezim orde baru. Namun dibalik euforia menyongsong pilkada langsung dewasa ini, ada masalah lain yang dapat membuat agenda politik lokal ini paradoks, yakni potensi konflik yang dikandungnya. Karena itu potensi-potensi konflik harus dapat diantisipasi dan yang harus diwaspadai potensi- potensi yang bisa menyebabkan agenda politik lokal berbalik arah.

PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa teori dan pendapat yang telah dikemukakan maka pada penelitian ini faktor yang mempengaruhi perilaku memilih perempuan Batak Toba di Lingkungan XIV Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan citra kandidat merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku memilih.

Jika dikaitkan dengan teori berdasarkan pendapat Samuel Huntington bahwa faktor citra kandidat dapat mempengaruhi perilaku memilih dan dapat dibuktikan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa program kerja, faktor kebaikan, sikap merakyat dan ketokohan dari kandidat mampu mendongkrak kepopuleran seorang kandidat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku memilih. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori Him Melweit (dalam Ramlan Surbakti, 1992), bahwa kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, kejujuran, kebaikan, sikap merakyat dapat mempengaruhi perilaku memilih juga terbukti dalam penelitian ini.

Selanjutnya, faktor indentifikasi partai Sebagaimana dikemukakan William G. Jacoby yang mengatakan perilaku memilih dapat dipengaruhi oleh partai yang mengusung oleh partai pendukung calon juga terbukti dalam penelitian ini. Hasil penelitian pada putaran pertama dan kedua menunjukkan bahwa identifikasi partai dengan perilaku memilih responden cukup memberikan pengaruh terhadap pemberian suara walaupun tidak signifikan faktor citra kandidat.

Faktor etnisitas ternyata tidak terbukti dalam penelitian ini. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya dalam jurnal Budaya Patriarki dan Perilaku Politik Perempuan Dalam Pemilu di Desa Marsangap Tahun 2010 oleh Elizabeth Monika yang menyimpulkan bahwa budaya patriarki Batak Toba memiliki pengaruh terhadap perilaku politik perempuan Batak Toba. Dalam penelitian ini jelas menunjukkan bahwa faktor etnisitas tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku memilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor etnisitas yang merupakan turunan dari pendekatan sosiologis tidak terbukti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemilihan umum merupakan sarana yang digunakan oleh negara demokrasi untuk memilih pemimpin. Orientasi politik pemilihan perempuan adalah suatu produk yang tidak hadir dengan begitu saja, terdapat faktor-faktor pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang mempengaruhi orientasi politik seorang pemilih perempuan. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Perilaku pemilih perempuan etnis Batak Toba di Lingkungan XIV Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan pada Pemilihan Langsung Walikota/Wakil Walikota Medan putaran pertama dan kedua Tahun 2010 kurang dipengaruhi oleh faktor etnisitas, preferensi politik keluarga, politik uang dan gender. Isu primordial pada perempuan etnis Batak Toba tidak lagi menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Perempuan Etnis Batak Toba mulai mengalami perkembangan dalam hal memberikan suara pada Pemilu di mana mereka lebih memilih berdasarkan program kerja dan ketokohan dari calon kandidat itu sendiri.
- b. Faktor-faktor dominan dalam penentuan perilaku pemilih etnis Batak Toba di Lingkungan XIV Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan pada Pemilihan Langsung Walikota/Wakil Walikota Medan Tahun 2010 antara lain :
 - 1) Faktor Citra Kandidat :

Dalam hal ini yang menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pemilih adalah program kerja serta ketokohan dari kandidat itu sendiri. Dimana perempuan etnis Batak Toba menganggap bahwa program kerja dan ketokohan dari kandidat sangat penting dibandingkan faktor etnisitas, preferensi politik keluarga, isu gender maupun politik uang.

- 2) Identifikasi Partai :
Partai pendukung kandidat juga sangat mempengaruhi perilaku pemilih pada perempuan etnis Batak Toba di Lingkungan XIV Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan. Mereka beranggapan bahwa kandidat merupakan cerminan dari Partai yang mendukungnya.

Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menarik simpati pemilih guna memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada berikutnya, seorang kandidat perlu mensosialisasikan diri dengan seluruh strata masyarakat, dengan mengedepankan visi, misi dan program kerja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, bukan dengan mengedepankan janji-janji kepada masyarakat.
2. Bagi penegak demokrasi agar lebih meningkatkan kesadaran politik perempuan dengan pendidikan politik yang sehat agar lebih memahami hak-haknya dan pentingnya menggunakan hak-hak politiknya untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussomad. 2005. Primordialisme Keagamaan Dalam Masyarakat Islam Indonesia., Jakarta: LIPI.
- Affandi, Idrus. 1996. Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik. Disertasi Pasca Sarjana IKIP Bandung. Tidak diterbitkan.
- Bedjo, Riyanto. 2004. Iklan Politik, Era Image dan Kekuasaan Media dan Kekuasaan Media. Jurnal Nirmala : Vol. 6, No. 2. 2004
- Budiardjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama
- Firmanzah. 2007. Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan,. 2005. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hughes, M. 2009. Armed Conflict, International Linkages and Women Parliamentary Representation In Developing Nation, Social Problem
- Marijan, Kacung 2006. Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Langsung. Pustaka Eureka, Surabaya.
- Masduki, Teten, 11 Februari 2005, Pilkada Rawan Politik Uang. Harian Kompas.
- Nadzir, Mohammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Noor, Firman. 2008. Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordial di Indonesia. Jakarta: LIPI
- Putra, Fadillah. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ubed, Abdillah, 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Magelang: Yayasan Indonesia.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wieringa, S. 1999. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Barbara dan Kalamindra

Winarno, Budi, 2007, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Jakarta: Media Pressindo.